

**PENOLAKAN PERDAMAIAN BERDASARKAN PASAL 285 JO 281
UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



**Disusun Oleh :
Liasta Sri Malem
15.400.500.61**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2019**

Visi Universitas Kristen Indonesia

Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten dibidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Liasta Sri Malem

NIM : 15.400.500.61

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Pada tanggal 13 Februari 2019 dan
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S1)

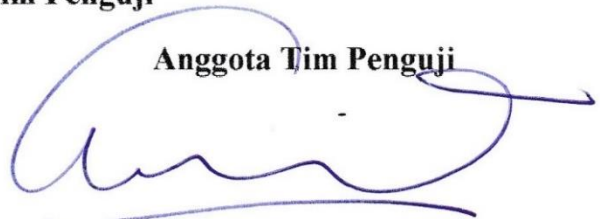
Susunan Tim Penguji

Pembimbing I



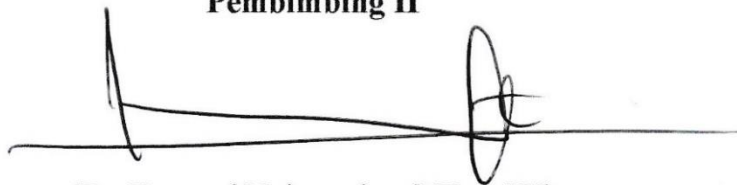
(Rr. Ani Wijayati S.H., M.Hum)

Anggota Tim Penguji



(Edward M.L. Panjaitan, SH., LL.M.)

Pembimbing II



(Dr. Bernard Nainggolan S.H., M.H)

PESERTA UJIAN

Nama : Liasta Sri Malem

NIM : 15.400.500.61

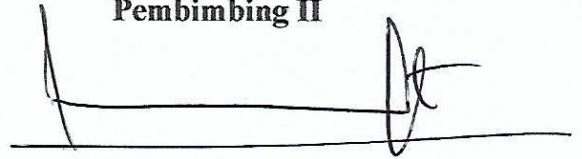
**Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Studi Kasus Putusan No.04/ Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)**

Pembimbing I



(Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)

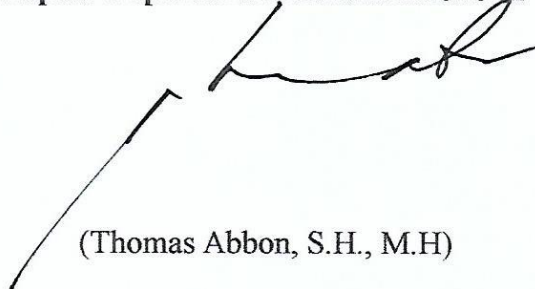
Pembimbing II



(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi



(Thomas Abbon, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini, dengan Judul “Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No.04/ Pdt.Sus-PKPU/ 2018/ PN.Niaga.Jkt.Pst.)”. Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Skripsi ini juga membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada hakekatnya tujuan PKPU adalah perdamaian antara Debitor dan Kreditor. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU merupakan tujuan utama bagi debitor, untuk menyusun rencana pembayaran utangnya kepada kreditor. Hakekat dari suatu perjanjian dasarnya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, dalam skripsi ini penulis mengulas permasalahan terhadap penolakan perjanjian perdamaian dalam PKPU. Dalam hal suatu putusan dari PKPU, Undang-undang mengatur bahwa putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum ekonomi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan hukum ini, yaitu:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, pengertian, dan nasehatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang atas kesabaran, pengarahan, bimbingan, pengertian dan nasehatnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
6. Bapak Inri Januar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas kebaikan, bantuan dan nasehatnya.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan bidang lainnya.
8. Staf Pengajar dan Petugas Perpustakaan, atas bantuannya selama ini

9. Papa, Mama, Adek Caroline, dan keluarga besar Sitepu dan Sinaga yang selalu mendoakan, selalu memberikan nasehat, selalu memberikan dukungan, dan kasih sayang.
10. Johannes Adrian yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan dukungan dan doa untuk Penulis disaat Penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini.
11. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia khususnya untuk Anathasia Lestari, Bunga Siti Aisyah, Cornelia Lucia, dan teman teman yang lain, yang memberikan kebahagiaan, kegilaan, serta dukungan dan nasihat-nasihat kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis selama mengerjakan skripsi Benny, Inggrid Natasia, yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Teman seperjuangan yang mengerjakan dan bimbingan bersama-sama selama proses pengerjaan skripsi ini Vitryana Rory, Niko Utomo, Jan Partogi, Kevin Manalu.
14. Jean Cloudia yang membantu selama proses pengerjaan skripsi.
15. Sahabat-sahabat “Dream Teather” semuanya, Adzmi, Brili, Devara, Putri, Fadhil, Faldy, Baim, kiki, Maria, Galuh, Rizaldy, Yohana yang sudah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
16. Teman-temanku dari SD 09 Pagi Jakarta, SMPN 194 Jakarta, dan SMAN 44 Jakarta yang tidak bisa Penulis tuliskan satu-persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasehat-nasehat.

17. Teman-teman FH UKI 2015 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran.

Semoga bantuan dan budi baik semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis dengan besar hati akan menerima apabila ada kritik dan masukan terkait penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh manusia.

Jakarta, 7 Februari 2019

(Liasta Sri Malem)
Penulis

ABSTRAK

Nama : Liasta Sri Malem
 NIM : 15.400.500.61
 Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
 Judul : Penolakan Perdamaian Berdasarkan Pasal 285 Jo 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga. Jkt.Pst.)
 Jumlah Halaman : 96 Halaman + xii + Daftar Acuan 29 buku + 3 Peraturan Pemerintah
 Dosen Pembimbing : 1. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
 2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
 Kata Kunci : PKPU, Voting, Penolakan Rencana Perdamaian

Skripsi ini membahas mengenai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proposal rencana perdamaian Debitor pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah memberikan hak suaranya tetapi tidak menandatangani perjanjian perdamaian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini adalah rencana perdamaian harus mendapat persetujuan kuorum dari para kreditor pada saat debitor mengusulkan perdamaian, yang dimana debitor akan membayar sebagian atau seluruh utangnya dalam jangka waktu tertentu. Proses perdamaian memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan perdamaian tidak hanya didasarkan kepada hasil voting dari kreditor yang jumlahnya diatur oleh Undang-undang. Tetapi, juga perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang mengakibatkan rencana perdamaian tersebut ditolak pengesahannya. Penolakan atas rencana perdamaian bukan berasal dari jumlah persetujuan kreditor, melainkan pada pertimbangan hakim yang menganggap rencana perdamaian tidak cukup terjamin pelaksanaannya.

Jakarta, Februari 2019

Penulis

(Liasta Sri Malem)

ABSTRACT

Name : Liasta Sri Malem
 NIM : 15.400.500.61
 Specific Program : Economic Law
 Title : Rejection of Conciliation based article 285 Jo 281 Law Of Number 37 Of 2004 On Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts (Case Study Decision No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
 Page : 96 Pages + xii + Book Reference 27 + Government Regulation 3
 Adviser : 1. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
 2. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
 Keyword : Suspend of Payment, Voting, Rejection of the Peace Plan

This thesis discussed about accord/composition plan in bankruptcy Suspension of Payment According to Act bankruptcy. The objective to be achieved in this study is to review and analyze the Debtor's peace plan proposal in bankruptcy suspension of payment according to act bankruptcy Obligation which has granted its voting rights but doesn't sign the peace agreement.

The research method used in this study is normative juridical, namely library research, which will produce a descriptive study. The data sources used in this study are secondary data obtained from the literature, namely drawing conclusions from a problem that is general to the concrete problems faced.

The results of this study are that the peace plan must get quorum approval from creditors when the debtor proposes peace, in which the debtor will pay part or all of his debt within a certain period of time. The peace process provides an opportunity for debtors to propose peace not only based on the results of voting from creditors whose amount is regulated by law. However, also need to consider the factors that lead to the composition plan was rejected ratification. Rejection of the composition plan didn't come from the number of creditor approval, but ini consideration of the judge who considers composition plan isn't sufficiently guaranteed observance.

Jakarta, February 2019
 Penulis

(Liasta Sri Malem)

DAFTAR ISI

VISI MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Bahan Hukum Primer	10
2. Bahan Hukum Sekunder	10
3. Bahan Hukum Tersier	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	14
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	 19
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	19
1. Pengertian dan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)....	19

2.	Pelaksanaan PKPU Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	22
3.	Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan PKPU	25
4.	Pengakhiran PKPU	27
B.	Perdamaian Dalam Hukum Perdata	29
1.	Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perdamaian	29
2.	Subyek dan Obyek Perdamaian	34
3.	Bentuk Perdamaian yang tidak dibolehkan.....	35
4.	Akibat Hukum.....	37
5.	Pembatalan perjanjian perdamaian	39
C.	Perdamaian Dalam PKPU.....	40
1.	Pengertian dan Pengaturan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	40
2.	Pengajuan Rencana Perdamaian	41
3.	Pihak Yang Dapat Mengajukan Rencana Perdamaian.....	44
4.	Pengesahan Perdamaian.....	47
5.	Status PKPU Tetap Setelah Pengesahan Perdamaian	49
6.	Rencana Perdamaian dalam PKPU Mengikat Baik Kreditor Maupun Debitor	50
BAB III PENERAPAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....		51
A.	Tata Cara PKPU Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004	51
B.	Kriteria Voting dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.....	58
1.	Pengertian Voting	58
2.	Kriteria Voting	59
3.	Kedudukan Kreditor dalam Penentuan Voting	62
4.	Rencana Perdamaian dalam Putusan No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn .Niaga.Jkt.Pst 65	
6.	Analisis Terhadap Putusan No.04/Pdt.Sus-PKPU/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst.....	70

BAB IV PENERAPAN PASAL 285 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM PUTUSAN NOMOR 04/PDT SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST	73
A. Penolakan Dalam Perjanjian Perdamaian	73
B. Penerapan Pasal 285 dalam Putusan Nomor 04/PDT SUS/ PKPU/ 2018/ PN. NIAGA.JKT.PST	74
1. Kasus Posisi	74
2. Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 04/PDT SUS/ PKPU/ 2018/ PN.NIAGA. JKT.PST.,.....	77
3. Analisis Putusan Nomor 04/PDT.SUS/ PKPU/ 2018/ PN.NIAGA .JKT. PST	87
BAB V KESIMPULAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97